

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bidang studi Hubungan Internasional, terdapat berbagai jenis hubungan antara negara-negara di seluruh dunia, termasuk hubungan yang bersifat kooperatif dan kompetitif. Amerika Serikat dikenal sebagai negara adidaya yang memiliki peran penting dalam politik internasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan politik Amerika Serikat yang menarik perhatian dan berdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam tata dunia global. Amerika Serikat memiliki kekuatan besar untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya melalui peran kunci dalam Six Party Talks, termasuk dalam isu sensitif seperti pengembangan nuklir Korea Utara yang selalu menjadi perbincangan hangat.

Korea Utara merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Timur, berbatasan langsung dengan Korea Selatan, Rusia, dan Tiongkok. Korea Utara merdeka ketika mendapat dukungan oleh Uni Soviet pada tanggal 9 September 1948 dan memilih Kim Il-Sung sebagai pemimpinnya. Program nuklir Korea Utara digagas pada tahun 1956 dan termasuk dalam jajaran perjanjian dengan Uni Soviet dalam hal kerjasama penggunaan senjata nuklir untuk mewujudkan perdamaian. Sejak perjanjian ini disetujui oleh kedua belah pihak, Korea Utara mulai mengirimkan ilmuwan dan tenaga ahli ke Uni Soviet untuk mendapatkan pelatihan yang tentunya membentuk ilmuwan dari negara komunis lainnya (Woo H. , 2008).

Pada dasarnya Korea Utara merancang strategi yang tidak sulit dimengerti, yakni agar dapat bertahan hidup. Puluhan Tahun yang lalu, para petinggi dan penguasa di Korea Utara berinisiatif untuk merakit senjata nuklir sebagai jawaban atas strateginya. Bahkan saat berita mengenai Saddam Hussein meninggal, dengan sangat lantang Korea Utara mengatakan bahwa Saddam Hussein pasti masih hidup sampai saat ini jika ia mempunyai senjata pemusnah massal.

Diperlukan kerjasama dan dukungan dari sekutu di Asia yang telah menyuarakan dukungan mereka melalui Joint Statement yang melalui Six Party Talks Tahun 2005 untuk tujuan denuklirisasi. Amerika Serikat, Jepang, Cina, Rusia, Korea Selatan, dan Korea Utara semuanya telah menandatangani petisi ini. Six Party Talks atau pembicaraan enam negara merupakan pertemuan yang diadakan antar enam negara dan membahas masalah program nuklir Korea Utara. Pembicaraan ini adalah imbas dari penarikan diri Korea Utara dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada tahun 2003. (Scanlon, 2007)

Hasil nyata dari Six Party Talks ini baru terlihat saat sudah berlangsung lima hal pertemuan. Walaupun begitu, setelah 3 kali diadakan pertemuan dan pembicaraan hasilnya hanya sedikit kemajuan. Hingga tibalah pada putaran ketiga sampai kelima pembicaraan, barulah pertemuan ini menghasilkan sesuatu. Korea Utara sepakat untuk mengakhiri segala aktivitas nuklirnya sebagai ganti bantuan bahan bakar dan langkah-langkah memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat dan Jepang (Letian & P, 2007). Six Party Talks sendiri pada dasarnya tidak hanya berfokus kepada denuklirisasi Korea Utara. Aliansi ini juga turut membahas tentang jaminan keamanan, isunya dinaikkan oleh Korea Utara sejak masa kepemimpinan

Presiden Bush di tahun 2001-2009. Selain itu, terdapat pembicaraan mengenai hubungan diplomatik, diawali dengan Korea Utara yang mengharapkan normalisasi hubungan diplomatik sebagai bagian dari perintah untuk menghentikan program senjata nuklirnya (Andrei & Lankov, 2019).

Strategic patience sendiri merupakan pendekatan yang digagas oleh pemerintahan Obama, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam hal apapun dengan Korea Utara sampai negara itu menunjukkan perilaku positif, kooperatif, dan memiliki niat untuk bernegosiasi. Komitmen ini berkaitan dengan hukuman yang sudah ada dan dibuat oleh Proliferation Security Initiative yang didirikan pada era George W. Bush. Beberapa pihak yang mendukung kebijakan ini menegaskan bahwa kebijakan strategic patience dapat mempertahankan Amerika Serikat untuk menciptakan lingkungan negosiasi.

Strategic patience memiliki tujuan yang benar untuk mempertahankan stabilitas dunia dalam jangka panjang tanpa harus mengerahkan militer atau persenjataan dan mengancam keamanan negara lainnya. Namun, hasil yang didapat pun tak jarang jauh dari ekspektasi para pejabat Amerika Serikat. Banyak sekali analisa dan prediksi yang meleset. Korea Utara sendiri masih sering melakukan uji coba nuklir dengan kepercayaan diri penuh. Keadaan keamanan internasional masih sangat mengkhawatirkan, setidaknya itulah yang terus meresahkan Amerika Serikat. Sikap utama dari kebijakan strategic patience adalah bahwa Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam perundingan apapun dengan Korea Utara sampai Korea Utara membuktikan kesungguhannya dalam bernegosiasi melalui denuklirisasi. Berdasarkan kebijakan semacam itu, Washington menuntut agar

Pyongyang harus mengambil langkah-langkah denuklirisasi yang efektif tanpa merugikan pihak manapun yang bertujuan sebagai pemenuhan Joint Statement Six Party Talks pada tahun 2005 sebagai prakondisi untuk pembicaraan langsung (Rinehart & I, 2011).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Hans M. Kristensen dan Robert S. Norris dengan judul "A History of US Nuclear Weapons in South Korea," dijelaskan bahwa pengembangan proyek nuklir Korea Utara telah menyebabkan ketegangan dan krisis stabilitas keamanan di wilayah Asia Timur. Ancaman ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan tersebut, tetapi juga oleh Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Amerika Serikat, yang menolak proyek nuklir Korea Utara, terus berusaha untuk mendorong Korea Utara agar melakukan denuklirisasi melalui berbagai strategi kebijakan luar negeri. International Atomic Energy Agency (IAEA) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1957 dengan tujuan mempromosikan penggunaan teknologi nuklir secara aman untuk mencapai perdamaian, kesehatan, dan kesejahteraan global. Meskipun Korea Utara menyatakan bahwa fasilitas nuklirnya hanya digunakan untuk penelitian ilmiah, masyarakat internasional meragukannya karena sejarahnya yang pernah menyerang Korea Selatan pada tahun 1950. Untuk mengatasi keraguan dan kekhawatiran masyarakat internasional, Korea Utara menandatangani perjanjian dengan IAEA pada tahun 1977. IAEA berperan dalam mengawasi perkembangan proyek energi nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara (Hans M Kristensen & Robert S. Noris, 2017).

Joel S. Wit, Jon Wolfsthal, dan Choong-suk Oh menjelaskan pada jurnal yang berjudul “The Six Party Talks and Beyond: Cooperative Threat Reduction and North Korea” pada era memasuki pemerintahan George Walker Bush di Tahun 2001, hubungan bilateral Amerika Serikat dan Korea Utara mengalami kemerosotan dan ketegangan. Hal tersebut diakibatkan oleh George W. Bush saat pidatonya di hadapan Kongres Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Korea Utara sama saja dengan Irak dan Iran yakni “axis of evil”. Dalam pidatonya Bush menegaskan bahwa *“North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction, while starving its citizens. State like these and their terrorist allies, constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world”*. George W Bush yang berasal dari partai Republik menganut gaya kepemimpinan dan kebijakan luar negeri yang tegas serta tidak sungkan menggunakan hard power. Dalam melawan isu pengembangan proyek senjata nuklir Korea Utara, presiden George Bush membentuk Six Party Talks (SPT). Six Party Talks terdiri dari enam negara yaitu Amerika Serikat, Korea Utara, Korea Selatan, Rusia, Jepang, dan China. Six Party Talks sejak Tahun 2003 telah melakukan pertemuan sebanyak enam kali, tetapi pada Tahun 2008 mengalami kegagalan. Gagal dalam mencapai kesepakatan disebabkan tuduhan Amerika Serikat terhadap Korea Utara yang sedang mengadakan program pemilahan uranium dan memulai kembali pengembangan uji coba senjata nuklir miliknya.

Tidak itu saja, Amerika Serikat meminta dukungan dari Dewan Keamanan PBB agar dapat memudahkan upaya denuklirisasi Korea Utara dengan memberikan tuntutan atau sanksi. Masih dalam tahun yang sama, akhirnya Dewan Keamanan

PBB mengeluarkan resolusi 2094 yang didalamnya berisikan perintah memberikan sanksi terhadap Korea Utara. Chris McGreal mengatakan dalam jurnalnya yang berjudul “Obama Engagement Policy ‘in Tatters’ After North Korean Rocket Defiance” Pada masa pemerintahan Barack Obama, dikeluarkan Kebijakan Strategic Patience yang bertujuan untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara. Pada kebijakan Strategic Patience, Obama menggabungkan strategi melalui dialog dan tekanan terhadap Korea Utara. Obama mengungkapkan bahwa minimnya hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Korea Utara akan membuat Korea Utara semakin meningkatkan kapasitas program nuklirnya. Tetapi sama halnya seperti kebijakan luar negeri sebelumnya, kebijakan ini mengalami kegagalan pada era pemerintahan Barack Obama dalam upaya denuklirisasi senjata nuklir Korea Utara (McGreal & Chris, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa, literatur-literatur diatas memuat faktor-faktor munculnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Pada salah satu literatur dijelaskan bahwa lahirnya kebijakan luar negeri AS pada awalnya disebabkan oleh pergerakan pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara. Mulai dari kebijakan yang bersifat diplomasi, ancaman, hard power, hingga pendekatan. Ketiga literatur tersebut menyuguhkan ide untuk peneliti mengenai politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Selain itu, belum dijabarkan juga proses-proses pembuatan kebijakan AS ini. Peneliti akan mengisi kekosongan mengenai kebijakan Strategic Patience dan menganalisisnya lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

Ditinjau dari penjelasan pada bagian latar belakang maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut, “Bagaimana proses pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Strategic Patience Pada Masa Pemerintahan Barack Obama?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum dibuat untuk memenuhi persyaratan gelar S1 pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penelitian ini adalah penulis berusaha untuk menganalisa proses pembentukan kebijakan Strategic Patience Barrack Obama terhadap Korea Utara terkait permasalahan nuklir pada periode 2009-2016.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 The Domestic Policy on Foreign Policy Decision Making

Keputusan kebijakan luar negeri yang diambil oleh kepala pemerintahan. Kebijakan Luar Negeri dirancang oleh kepala pemerintahan dengan tujuan mencapai tujuan domestik dan internasional. Ini biasanya melibatkan serangkaian langkah yang rumit di mana politik domestik berperan penting. Kebijakan luar negeri dalam banyak kasus dirancang melalui koalisi aktor dan kelompok domestik

dan internasional. Saat menganalisis kepala pemerintahan atau dengan kata lain pelaksana kebijakan luar negeri banyak faktor pendorong dapat diidentifikasi untuk menjelaskan alasan di balik keputusan yang diambil. Beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk kepribadian dan kognisi pemimpin itu sendiri, tingkat rasionalitas, politik domestik dan kelompok kepentingan internasional dan domestik. Namun dari semua faktor yang disebutkan itu adalah politik dalam negeri yang membentuk keseluruhan kerangka pengambilan keputusan di suatu negara bahkan dalam konteks internasional. (Bueno de Mesquita, 1992).

Para pemimpin nasional, terutama kepala pemerintahan harus memainkan permainan dua tingkat antara politik internasional dan domestik. Kepala pemerintahan dalam sistem politik apapun dimotivasi oleh dua tujuan yang sama yaitu mempertahankan kekuasaan politik dan membangun serta mempertahankan koalisi kebijakan. Politik dalam negeri juga dapat mempengaruhinya karena ia ingin mencapai tujuan dalam negeri melalui politik luar negeri atau ia ingin keputusan politik luar negerinya tidak mengganggu agenda dalam negeri.

Proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri harus melalui beberapa tahapan. Kebijakan luar negeri dibuat dan dilaksanakan dalam konteks politik internasional dan domestik, ada beberapa aspek yang harus dipahami oleh suatu negara untuk menentukan pilihan kebijakan luar negeri yang terbaik. Salah satunya adalah penetapan tujuan, suatu negara memiliki beberapa tujuan kebijakan luar negeri. Pemerintah harus menentukan tujuan mana yang dipengaruhi oleh lingkungan politik internasional dan domestik dalam waktu tertentu. Selain itu, tujuan kebijakan luar negeri dapat bertentangan hingga mengharuskan pemerintah

untuk memprioritaskan. Kemudian penentuan opsi kebijakan, sebuah negara harus menentukan opsi kebijakan apa yang tersedia untuk memenuhi tujuan atau sasaran yang ditetapkan dalam konteks lingkungan politik

Hal ini biasanya akan melibatkan penilaian kapasitas negara untuk mengimplementasikan opsi kebijakan dan penilaian konsekuensi dari setiap opsi kebijakan. Setelah itu baru tindakan pengambilan keputusan, keputusan kebijakan luar negeri akan diambil pada tingkat tertentu dalam pemerintahan. Keputusan kebijakan luar negeri biasanya dibuat oleh cabang eksekutif pemerintah. Aktor atau lembaga pemerintahan umum yang membuat keputusan kebijakan luar negeri umumnya adalah kepala negara (seperti presiden) atau kepala pemerintahan (seperti kongres dan senat), kabinet, atau menteri. Setelah melewati proses pengambilan keputusan, kemudian implementasi opsi kebijakan yang dipilih. Setelah opsi kebijakan luar negeri dipilih, dan keputusan telah dibuat, maka kebijakan tersebut harus diterapkan. Kebijakan luar negeri paling sering diterapkan oleh badan kebijakan luar negeri khusus dari birokrasi negara, seperti Departemen Pertahanan (Hudson, 2014)

1.4.2 Domestic The Domestic Policy: Characteristic and Institutions

LoA Politik Domestik dalam penyusunan kebijakan Luar Negeri adalah hal yang dianggap penting yang merupakan kelanjutan dari implementasi politik luar negeri itu sendiri. LoA politik domestik adalah alat analisis yang tertuju pada sifat suatu negara. Hal tersebut dibuktikan pada hubungan dan keterkaitan antara pembentukan dan pengambilan keputusan terkait dengan bagaimana politik

domestik ini terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Untuk menganalisis kebijakan luar negeri melalui level of analysis dapat diketahui melalui dua variabel yakni nasional dan internasional. Variable nasional dapat mempengaruhi bagaimana variabel domestic dibuat. Dalam mengimplementasi LoA politik domestik, kebijakan politik luar negeri pada suatu negara memiliki dua variabel yakni variable sistemik dan domestik. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara baik dalam kebijakan politik luar negeri dan politik domestik pasti akan mempertimbangkan kondisi dalam negeri suatu negara, sehingga pada akhirnya akan memunculkan pilihan-pilihan yang ditawarkan tanpa ada campur tangan faktor eksternal negara (Fearon, 1998).

Hudson juga menjelaskan bahwasanya politik domestic yang dilakukan oleh suatu negara tentu memiliki korelasi dari pelaksanaan kebijakan luar negeri yaitu keterlibatan institusi. Institusi mampu menciptakan berbagai pilihan yang ditawarkan yang berkaitan dengan hak veto, supermayoritas yang diperlukan untuk jenis tindakan legislatif tertentu, persyaratan untuk tinjauan yudisial, dan sistem penganggaran (Hudson, 2014).

Kemudian, Hudson memaparkan bahwasanya terkait dengan hal-hal yang menjadi pertimbangan politik domestik suatu negara juga terdapat pola perilaku negara dalam membentuk kebijakan luar negeri yang dilakukan. Pertama, terkait setiap foreign policy decision making (FPDM) yang merupakan aktor politik domestik suatu negara. Kedua, pilihan pendapat atau masukan aktor politik domestik dapat ditinjau dari segi fragmentasi dan kohesivitasnya dalam membuat keputusan. Dengan semakin berpengaruhnya suatu rezim, maka akan semakin kuat

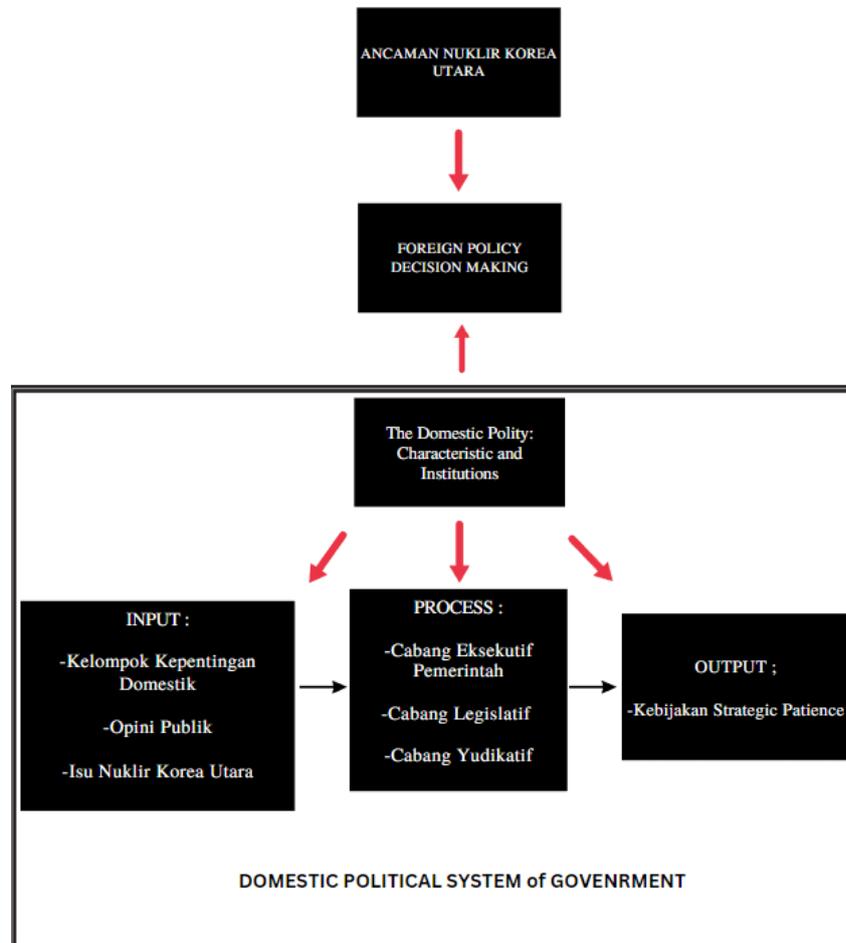
posisinya pada kegiatan perpolitikan dalam negeri. Namun, hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara dengan menggunakan level analisis politik domestik adalah tingkat dari frekuensi aktivitas dari aktor yang terlibat pada politik domestik itu sendiri (Hudson, 2014).

Dalam kebijakan luar negeri suatu negara, aktor politik dalam negeri memiliki pengaruh pada eksistensinya untuk menunjukkan power dalam membuat foreign policy suatu negara. Aktor-aktor yang terlibat pada kegiatan politik domestik suatu pemerintahan antara lain cabang Eksekutif Pemerintah, cabang legislatif, cabang Yudikatif, kelompok kepentingan domestik. Dengan demikian, LoA politik domestik memiliki peran penting untuk membuat kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini disebabkan karena kebijakan luar negeri merupakan penggambaran dari kebijakan politik negara. Pada loA domestik, kebijakan luar negeri suatu negara dapat diidentifikasi melalui dua variabel yaitu variabel sistemik dan domestik (Hudson, 2014). Anggapan yang menjadi alasan penggunaan politik dalam negeri sebagai dasar utama kebijakan luar negeri adalah sifat kecenderungan seorang pemimpin dalam mencapai kekuasaan politik dan koalisi partai. Analisis LoA politik domestik memiliki kelebihan dan kekurangan seperti mengetahui bagaimana koalisi perpolitikan suatu negara dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri.

Bagaimana kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh politik domestik dapat dijelaskan melalui gagasan bahwa pembuat kebijakan berada dalam tekanan dari dua sumber yang saling terkait, yaitu politik domestik dan lingkungan internasional, atau yang dikenal sebagai nested game. Di satu sisi, politik domestik mencerminkan

persaingan antara berbagai kepentingan di dalam pemerintahan. Di sisi lain, politik domestik juga dapat menyebabkan krisis dalam negeri, di mana para aktor menggunakan kebijakan luar negeri secara agresif untuk mengatasi tekanan dari pihak oposisi dalam negeri. Terdapat dua tujuan politik domestik yang mendorong aktor, yaitu pembentukan koalisi dan usaha mempertahankan kekuasaan politik (Hagan, 1987). Pembentukan koalisi domestik bertujuan untuk mendapatkan dukungan untuk kebijakan yang diusulkan, sehingga kebijakan luar negeri menjadi hasil dari strategi politik. Sementara itu, usaha mempertahankan kekuasaan politik mendorong penyesuaian kebijakan luar negeri untuk meminimalkan risiko dalam negeri. Oleh karena itu, aktor yang berusaha mempertahankan kekuasaan politik harus menghadapi oposisi dalam negeri dan perlu mendapatkan dukungan baik dari opini publik domestik maupun internasional terhadap kebijakan yang diambil (Farnham, 2004). Kesimpulannya, pemahaman tentang politik domestik ini penting untuk mengklasifikasi dan menganalisis kepentingan dan kebutuhan dasar suatu negara.

1.5 Sintesa Pemikiran



Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran

Gambaran pada bagan 1.1 menunjukkan bagaimana alur dan kerangka berpikir yang nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam menjabarkan keseluruhan isi pada penelitian ini. Dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat. Faktor tersebut meliputi sistem pemerintahan dan aktor. Dalam politik domestik terdapat beberapa aspek yang dijalankan untuk merumuskan sebuah kebijakan luar negeri. Inisiatif kebijakan luar negeri umumnya dibuat oleh cabang eksekutif pemerintah. Aktor atau lembaga pemerintahan umum yang menyusun keputusan kebijakan luar negeri

umunya adalah presiden didukung lembaga-lembaga dibawahnya, dan menteri. Setelah melewati proses pengambilan keputusan, kemudian implementasi opsi kebijakan yang dipilih. Setelah opsi kebijakan luar negeri dipilih, dan keputusan telah dibuat, baru kemudian kebijakan tersebut dapat diterapkan.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan kerangka pemikiran, Proses pembuatan kebijakan strategic patience dipengaruhi oleh aktor – aktor politik domestik. Lingkungan politik dalam negeri AS terdiri dari keputusan luar negeri yang dibuat oleh kepala negara dan dipengaruhi oleh politik dalam negeri. Peneliti ingin mengupas proses pembuatan kebijakan strategic patience ini dipengaruhi oleh apa saja dan bagaimana opsi kebijakan tersebut dipilih oleh presiden untuk menanggapi ancaman dari negara lain. Dinamika politik domestik sebagai penjelas kebijakan luar negeri menekankan pentingnya penerimaan agen-agen dalam negeri, hal ini dilandasi dengan poin penting terkait pembuat kebijakan. Sederhananya, bila kebijakan luar negeri tidak dapat diterima di ranah domestik maka kebijakan tersebut tidak dapat berhasil dalam lingkup internasional. Dalam hal ini, tuntutan dan aspirasi yang berkembang di ranah domestik menjadi sumber pertimbangan opsi kebijakan luar negeri. Dalam perannya pada proses pengambilan kebijakan, seorang aktor politik domestik dapat ditinjau dari segi fragmentasi dan kohesivitasnya dalam membuat keputusan. Dengan semakin berpengaruhnya suatu rezim, maka akan semakin kuat posisinya pada kegiatan perpolitikan dalam negeri.

Di bawah pemerintahan Barrack Obama, Amerika Serikat menjembatani politik demokratis terhadap kebijakan luar negeri melalui pendekatan yang berorientasi pada sektor domestik. Menanggapi ancaman Korea Utara dengan tegas demi kedaulatan dan kepentingan nasional mendorong adanya negosiasi yang menyangkut harga diri bangsa, termasuk meningkatnya kepercayaan diri pada pilihan kebijakan yang lebih ambisius. Perilaku ambisius pemerintahan Barrack Obama dalam hal ini juga didukung oleh permintaan dari publik Amerika Serikat yang tidak membenarkan perilaku Korea Utara. Pemilihan opsi kebijakan ini mendapatkan dukungan dari senat, kongres, dan Departemen Pertahanan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian dari penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Penulis mengumpulkan dan mencari informasi secara mendetail untuk mendapatkan justifikasi dari kasus yang diangkat. Dengan ini penulis menggunakan sebuah proses pengumpulan data sekunder dan pengambilan kesimpulan dengan akurat karena pengumpulan data tidak bisa diabaikan begitu saja (Yosani, 2006). Penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan gejala sosial yang terjadi (IKAPI, 2018), Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan untuk menjawab suatu masalah yang terjadi dan mendapatkan informasi lebih rinci terkait suatu fenomena dengan menggunakan aspek-aspek pendekatan kualitatif. Maksudnya, penelitian ini menggambarkan bagaimana proses dipilihnya kebijakan Strategic Patience sebagai

jawaban dari permasalahan nuklir Korea Utara yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis tidak memperoleh data secara langsung dengan bertanya kepada narasumber atau menemui pihak langsung yang berkaitan di dalam kejadian ini. Maka dari itu pencarian data yang akan dijadikan sumber data bagi penulis dan penelitian ini nantinya berbentuk data sekunder atau Secondary Data, karena data yang penulis pakai sudah tersedia dan nantinya penulis akan mengamati dan menganalisis lebih lanjut untuk menjawab beberapa rumusan masalah di penelitian ini (Bruce A & Thyer, 2001). Semua data yang penulis akses berasal dari beberapa jurnal ilmiah, media online, reports dari website government organization, surat kabar, publikasi ilmiah skripsi, laporan dari institusi resmi, media yang terpercaya dan kredibel serta dapat dipertanggung jawabkan isi dari artikel atau berita yang penulis temui.

1.9 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini terdapat pada periode 2009-2016. Peneliti berangkat dari adanya laporan fasilitas dan materi nuklir yang dimiliki Korea Utara pada Mei 2009 serta pada 14 April 2009, Korea Utara menyatakan pengunduran dirinya dari forum Six Party Talks. Sedangkan, Barrack Obama dan Kim Jong Un ingin melangsungkan pembicaraan terkait denuklirisasi secara bilateral pada tahun 2016. Pada segi jangkauan masalah, penelitian ini hanya sebatas pada kepentingan

Amerika Serikat dalam proses denuklirisasi Korea Utara dalam kurun waktu 2009-2016 (Nabil, 2018).

1.10 Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Ditujukan untuk meneliti hal-hal yang memiliki korelasi dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek. Pendapat Moleong selaras dengan Bogdan dan Taylor, mereka mendeskripsikan bahwasanya penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif berarti data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail.

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menganalisis makna dari objek penelitian, sehingga dapat dikorelasikan dengan teori yang menjadi acuan oleh penulis. John Creswell mengungkapkan bahwa fokus dari metode kualitatif adalah gambar atau tulisan. Pada tulisan ini, penulis memanfaatkan sistem case study dimana penulis mencari, menganalisa, dan mendalami tentang proses pembuatan kebijakan luar negeri di AS terkait kasus nuklir Korea Utara (Bogdan & Taylor, 1975).

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang sebgain besar datanya diambil dari berbagai macam sumber seperti jurnal ilmiah, media online, reports dari website government

organization, Surat kabar, publikasi ilmiah. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat menjabarkan proses sosial secara rinci dan dapat memberikan penjelasan secara lengkap dari sebuah kejadian (Raco & Conny, 2010).

1.11 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menggunakan 4 bab utama yang ditujukan untuk mempermudah membaca penelitian ini.

BAB I memuat pendahuluan yang akan mendeskripsikan dan juga menguraikan mengenai topik penelitian ini, dan kurang lebihnya akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, argumen utama, dan juga metodologi penelitian.

BAB II memuat studi kasus dan analisis mengenai proses yang mempengaruhi kebijakan strategic patience, dari input yang akan menghasilkan kebijakan strategic patience.

BAB III memuat penjelasan mengenai proses hingga output dari kebijakan strategic patience ini, yang memuat kohesivitas dan dukungan dari kongres, senat, dan departemen pertahanan.

BAB IV memuat mengenai kesimpulan dan saran.